

Cita Ekonomika

JURNAL EKONOMI

Determinan Pembangunan Rumah di Kabupaten Merauke
Fenti J. Manuhutu

Analisis Elastisitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Manokwari
Hans Sammy M. Salakory

**Analisa Pengaruh Kinerja Keuangan (Rasio Efektivitas dan Rasio Kemandirian) Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Manokwari**
Febby S. Matulesy

**Pengaruh Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Semangat Kerja Karyawan
Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Ambon**
Ventje Jeffry Kuhuparuw

**Analisa Pengaruh Konflik Peran dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada
PT. Bank Central Asia Cabang Utama Ambon**
Novalien C. Lewaherilla

**Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan
Pembelian Semen Tonasa Di Kota Ambon**
Maudy Marla Tanihattu

Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Maluku
Asmaria Latuconsina

**Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bank Swasta
di Kota Ambon**
Sherly Rutumalessy

**Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan
Kemiskinan di Maluku Utara: Pendekatan Model CGE**
Amran Husen

**Bauran Pemasaran Jasa : Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah Pada
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon**
Imelda Talahatu

**Transformasi dan Reposisi Praktek Sumber Daya Manusia
Dalam Mencapai Keunggulan Kompetitif**
Roy Alan Wattimena

**Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan dan
Variabel-Variabel Makro Ekonomi yang Mempengaruhinya
di Kota Ambon**
*Yerimias Manuhutu
Desry Jonelda Louhenapessy*



ANALISIS ELASTISITAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MANOKWARI

Hans S. M. Salakory

Staf Pengajar STIE Mah-Eisa Manokwari

Abstract

This study aims to determine the financial performance of Manokwari regency using elasticity analysis, used quantitative descriptive analysis, using elasticity analysis tools in order to analyze the relationship or degree of sensitivity of the local taxes and levies toward Gross Regional Domestic Product in Manokwari Regency period 2006 - 2010. The test results showed the average tax elasticity in Manokwari regency reached 1.99% is elastic and thus the research hypothesis is accepted, the elasticity is 0.93% levies is inelastic and thus the research hypothesis was rejected.

Kata Kunci: PDRB, Pajak, Retribusi, Elastisitas

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apa bila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan dan Bantuan.

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan Produk Domestik

Bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Indikator lain, yaitu pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ini. Indikator ini lebih komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dikarenakan lebih menekankan pada kemampuan negara/daerah untuk meningkatkan PDB/PDRB agar dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Indikator ini secara simultan menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan

seiring dengan semakin cepatnya laju pertumbuhan penduduk.

Secara Makro ekonomi efek multiplier dari investasi pemerintah tercermin lewat pertumbuhan ekonomi yang merupakan proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan PDRB karena adanya kenaikan output secara agregat. Mengingat bahwa kegiatan ekonomi adalah basis PAD maka proses pertumbuhan kegiatan ekonomu dalam masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah Manokwari. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat juga akan meningkatkan pendapatannya yang pada gilirannya akan meingkatkan konsumsi dan tuntutan akan ketersediaan barang publik oleh pemerintah Kabupaten Manokwari adalah konsekwensi logisnya yang selanjutnya akan meningkatkan penerimaan pemerintah Kabupaten Manokwari dari sektor PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan yang sah. Siklus aliran penyediaan barang publik oleh

pemerintah Kabupaten Manokwari serta peningkatan PAD akan berlangsung terus menerus.

Tujuan Utama dari pembelanjaan pemerintah Kabupaten Manokwari adalah kesejahteraan atau peningkatan taraf hidup masyarakat, gambaran dari kesejahteraan atau semakin membaiknya taraf hidup masyarakat bisa di lacak dari pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari PDRB-nya.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Manokwari selamatanahun 2006 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif, bahkan rerata pertumbuhan ekonomi kabupaten Manokwari mencapai 9,56% jauh lebih baik diatas normalnya pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian yakni 6%. Laju pertumbuhan ekonomi Manokwari menunjukkan akselerasi yang semakin cepat dari tahun 2007 ke 2008 mencapai 10,20%, tapi kemudian melambat ditahun 2009 sebesar 9,63% dan 2010 sebesar 9,57%, fenomena fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari tersebut dianggap masi

wajar mengingat Kabupaten Manokwari adalah daerah yang baru berkembang hampir 10 tahun terakhir, selain itu ada beberapa distrik yang kemudian dimekarkan menjadi kabupaten yang sudah tentu akan berdampak pada besaran kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Manokwari.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi yang merupakan determinan dari PDRB adalah merupakan basis bagi Pajak dan Retribusi Daerah, oleh karena itu maka setiap peningkatan PDRB maka harapannya adalah peningkatan juga pada pajak dan retribusi.

Hipotesis ini bisa di analisis dengan elastisitas, Dengan hipotesa tersebut maka dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil seharusnya perolehan Pajak dan retribusi daerah juga stabil. Tetapi berdasarkan data DPPKAD Kabupaten Manokwari tahun 2012 didapatkan perkembangan pertumbuhan positif, artinya setiap tahun perolehan pajak dari tahun ke tahun

selalu bertambah dari tahun sebelumnya, secara rerata pertumbuhan mencapai 18,86 % atau pencapaian sebesar 118,86%, pada tahun 2007 meningkat menjadi 20,32% angka ini berarti terjadi perubahan atau pencapaian sebesar 120,32% dari tahun 2006, di tahun berikutnya pertumbuhan pajak turun menjadi 14,20% tetapi tetap menunjukkan pertambahan dari tahun sebelumnya sebesar 114,20%, di tahun 2009 pertumbuhan bahkan menjapai 22% tahun sebelumnya atau sebesar 36,26%, sayangnya di tahun 2010 pertumbuhan pajak yang sangat besar di tahun sebelumnya tidak terjadi di tahun ini, sebab pertumbuhan di tahun 2010 hanya mencapai 4,65%.

Walaupun secara umum pertumbuhan pungutan pajak mencapai rata-rata 18,86% tetapi sayangnya secara tahunan ternyata berfluktuatif dengan gap pertumbuhan yang terlampau jauh, karena pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 36,26%, tetapi sayangnya pertumbuhan tertinggi itu mencapai anti klimaks di tahun berikutnya yang sekaligus

merupakan tahun dengan pertumbuhan terendah yakni sebesar 4,65%, kondisi ini perlu dicermati secara mendalam, mengingat pencapaian pajak dari tahun ke tahun menyangkut beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Selain pajak yang adalah sumber pembiayaan konvensional ada juga sumber lain yang berasal dari retribusi daerah, secara keseluruhan atau rerata pertumbuhan, maka retribusi daerah pertumbuhannya mencapai 8,84%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 yakni sebesar 13,96% dari tahun sebelumnya, sementara yang terendah terjadi ditahun 2010 yang mencapai (-2,30%).

KajianTeori

ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut(sadono sukirno,2004:56) PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi

lebih memerlukan keberadaan faktorproduksi yang digunakandalam proses produksiiitu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut

Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu: *Pertama;Segi produksi*, PDRB merupakan jumlah netto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan untuk unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan lainnya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun),*Kedua; Segi Pendapatan*, PDRB merupakan

jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi karena ikut serta dalam proses produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun,) dan *Ketiga: Segi pengeluaran*, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non profit, investasi serta ekspor netto biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2002:3) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang berperan dalam membuat perencanaan kebijaksanaan dalam pembangunan, menentukan arah pembangunan serta mengevaluasi hasil pembangunan wilayah tersebut. PDRB dapat dijadikan sebagai indikator laju pertumbuhan

ekonomi sektoral agar dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi.

Elastisitas Dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Pajak

Persyaratan pertama dan yang paling jelas untuk suatu sumber pendapatan yaitu sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Sering kali didalam undang-undang atau peraturan daerah Pemerintah Daerah mempunyai banyak sekali jenis pajak tetapi tidak ada yang menghasilkan lebih dari persentase yang kecil dari anggaran pengeluarannya.

Meskipun demikian pengeluaran yang terjadi tidaklah bersifat statis, biaya pelayanan tersebut bisa meningkat karena berbagai macam alasan. Faktor inflasi dapat mendorong kenaikan biaya yang seringkali tidak proporsional kenaikannya kalau pelayanan pemerintah daerah bersifat pada karya sedangkan tingkat upah

disektor pemerintah meningkat melebihi kenaikan tingkat inflasi. Selain pertumbuhan penduduk, terutama dinegara-negara dunia ketiga pada umumnya dan kota-kota besar khususnya, permintaan pelayanan akan bertambah, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan prasarana. Selain itu peningkatan pada struktur pendapatan penduduk dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan permintaan pelayanan berkualitas tinggi.

Kalau biaya meningkat maka pendapatan juga harus meningkat. Paling tidak dari sudut pemerintah dikehendaki agar pajak-pajak tersebut menunjukkan elastisitasnya, yakni kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah, dan dasar pengenaan pajaknya yang berkembang secara otomatis misalnya apabila apabila harga-harga meningkat, penduduk disuatu daerah berkembang, dan pendapatan individu bertambah. Dalam hubungan itu elastisitas memiliki dua dimensi. Pertama adalah

pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri. Kedua untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut. Dalam hal lain elastisitas tergantung pada kepekaan keputusan yang diambil atau tuntutan atas kemampuan administrasinya.

Davey (1988:42) mengatakan bahwa elastisitas merupakan kualitas suatu sumber pajak yang penting. Elastisitas juga dapat dengan mudah diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan dalam indeks harga, penduduk, atau GNP. Perhitungan elastisitas juga dapat dilakukan dengan membandingkan dasar pengenaan pajak per kapita secara riil (dengan memperhitungkan tingkat inflasi). Dasar pengenaan pajak yang dimaksud adalah jumlah harta tetap, pendapatan atau transaksi komersial yang menjadi dasar perhitungan pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan PAD patut dipertanyakan.

Berdasarkan paparan latar belakang dan fenomena ekonomi yang muncul, maka yang menjadi

masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk Elastisitas Pajak Daerah dan Elastisitas Retribusi Daerah terhadap PDRB Kabupaten Manokwari?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis elastisitas Pajak Daerah dan elastisitas Retribusi Daerah terhadap PDRB Kabupaten Manokwari.

Hipotesis

Berdasarkan paparan latar belakang dan fenomena ekonomi yang muncul, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga bentuk Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Manokwari adalah Elastis.
2. Diduga bentuk Elastisitas Retribusi Daerah terhadap PDRB Kabupaten Manokwari adalah Elastis.

Metode

Populasi Dan Sampel

Penelitian ini menggunakan data keuangan pemerintah kabupaten Manokwari dan data pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu maka sesuai konsep penelitian yang

dikembangkan maka yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dalam hal ini APBD kabupaten Manokwari dan PDRB Kabupaten Manokwari.

Sampel penelitian ini disesuaikan dengan data runtun waktu yang digunakan, oleh karena itu sampelnya adalah APBD kabupaten Manokwari dan PDRB Kabupaten Manokwari selama 5 tahun dari tahun 2006 s.d 2010.

Teknik Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian maka digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan beberapa analisis Sensitivitas atau responsivitas dalam bentuk Elastisitas serta analisis rasio disesuaikan dengan data yang diperoleh, diantaranya adalah:

1. Elastisitas (Elasticity)

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan jika terjadi perubahan pada jumlah PDRB dan Jumlah Penduduk, tetapi untuk kepentingan analisis maka pengabaian untuk jumlah penduduk, dan formula

elastisitas menurut **Abdulah (2004:93)**

$$EPDRB = \frac{\Delta PAD}{\Delta PDRB}$$

Untuk kebutuhan penelitian maka PAD kemudian diprosikan pada penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan spesifikasi Model menurut **Sukirno (2005:106)** dan ditransform sebagai berikut:

$$EPDRB = \frac{\frac{T_t - T_{t-1}}{T_{t-1}}}{\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}}$$

$$EPDRB = \frac{\frac{R_t - R_{t-1}}{R_{t-1}}}{\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}}$$

Kriteria pengujian ahsil adalah dengan skala:

Nilai Elastisitas > 1 adalah pajak dan retribusi sifatnya elastis

Nilai Elastisitas = 1 adalah pajak dan retribusi sifatnya unitary

Nilai Elastisitas < 1 adalah pajak dan retribusi sifatnya inelastis

Hasil

Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2006 sampaidengan 2010.

Pajak dan retribusi daerah di setiap daerah otonom merupakan sumber pendapatan asli daerah sekaligus merupakan sumber pendapatan konvensional, sumber ini harus bisa di optimalkan guna kepentingan pembiayaan dan mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan dari pusat. Gambaran realisasi pajak dan retribusi daerah selama tahun pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabell

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Manokwari
Tahun 2006 s.d. 2010

	Pajak Daerah	g PD	Retribusi Daerah	g RD
2006	2821600019,00		2418268310,00	
2007	3395045974,00	20,32	2755934529,00	13,96
2008	3877137851,00	14,20	3121328850,00	13,26
2009	5283160876,00	36,26	3447338460,00	10,44
2010	5529079488,00	4,65	3368214254,00	-2,30
	4181204841,60	18,86	3022216880,60	8,84

Sumber: DPPKAD Kab. Manokwari, 2012

Pertumbuhan pajak secara keseluruhan menunjukkan angka positif, artinya setiap tahun perolehan pajak dari tahun ke tahun selalu bertambah dari tahun sebelumnya, secara rerata pertumbuhan mencapai 18,86 % atau pencapaian sebesar 118,86%, pertumbuhan ditahun 2007 adalah sebesar 20,32% angka ini berarti terjadi perubahan atau pencapaian sebesar 120,32% dari tahun 2006, ditahun berikutnya pertumbuhan pajak turun menjadi 14,20% tetapi tetap menunjukkan pertambahan dari tahun sebelumnya sebesar 114,20%, ditahun 2009 pertumbuhan bahkan menjapai 22% tahun sebelumnya atau sebesar 36,26%, sayangnya ditahun 2010 pertumbuhan pajak yang sangat besar di tahun sebelumnya tidak terjadi di tahun ini, sebab pertumbuhan ditahun 2010 hanya mencapai 4,65%.

Walaupun secara umum pertumbuhan pungutan pajak mencapai rata-rata 18,86% tetapi sayangnya secara tahunan ternyata berfluktuatif dengan gap

pertumbuhan yang terlampau jauh, karena pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 36,26%, tetapi sayangnya pertumbuhan tertinggi itu mencapai anti klimaks di tahun berikutnya yang sekaligus merupakan tahun dengan pertumbuhan terendah yakni sebesar 4,65%, kondisi ini perlu dicermati secara mendalam, mengingat pencapaian pajak dari tahun ke tahun menyangkut beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Selain pajak yang adalah sumber pembiayaan konvensional ada juga sumber lain yang berasal dari retribusi daerah, secara keseluruhan atau rerata pertumbuhan, maka retribusi daerah pertumbuhannya mencapai 8,84%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 yakni sebesar 13,96% dari tahun sebelumnya, sementara yang terendah terjadi ditahun 2010 yang mencapai (-2,30%).

Kondisi pertumbuhan retribusi daerah seperti diatas tentunya sangat memprihatinkan mengingat secara keseluruhan

pertumbuhan retribusi daerah kabupaten Manokwari justru menurun di setiap tahunnya.

Mencermati pencapaian dari pajak dan retribusi daerah, maka pemerintah daerah perlu membuat suatu pola yang baru dalam proses perencanaan hingga pertanggung jawaban, karena kegagalan dalam dalam perencanaan akan berdampak pada hasil akhir dari pendapatan pajak dan retribusi daerah kabupaten Manokwari, selain itu kegagalan dalam implementasi, pengawasan, dan juga pelaporan akan menyebabkan kebocoran yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaiannya.

Elastisitas Pajak dan Retribusi Daerah

Dalam teori ekonomi, elastisitas (e) diartikan sebagai

responsi atau derajat kepekan dari suatu variabel sebagai akibat perubahan pada variabel-variabel yang mempengaruhinya.

Dari kacamata keuangan negara, basis dari pajak dan retribusi daerah adalah prestasi ekonomi dari perekonomiannya, artinya naik turunnya persentase ekonomi yang terwujud lewat pertumbuhan ekonominya akan mempengaruhi persentase realisasi pajak dan retribusi yang dipungut.

- a. Elastisitas Pajak Daerah Kabupaten Manokwari
Pengaruh dari variabel pertumbuhan ekonomi terhadap realisasi pajak daerah kabupaten Manokwari dapat dilihat pada perhitungan tabel berikut:

	g PD	g PDRB	e PD/PDRB	Kriteria Pengujian	Sifatnya
1	2	3	4 (2:3)	5	6
2007	20,32	8,84	2,30	> 1	Elastis
2008	14,20	10,20	1,39	>1	Elastis

2009	36,26	9,63	3,77	>1	Elastis
2010	4,65	9,57	0,49	<1	Inelastis
Rerata			1,99	>1	Elastis

Sumber: hasil perhitungan, 2012

Elastisitas dalam kaitannya dengan pajak dan PDRB dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur perubahan relatif dalam satuan rupiah pungutan pajak daerah kabupaten Manokwari sebagai akibat perubahan satuan rupiah pada PDRB kabupaten Manokwari.

Berdasarkan tabel di atas dari tahun 2007 s.d. 2009 semua elastisitas berada pada kriteria > 1 yang berarti elastis sementara tahun 2010 elastisitasnya berada pada kriteria < 1 yang berarti sifatnya inelastis, secara rerata elastisitasnya berada pada kriteria > 1 dan sifatnya elastis.

Angka elastisitas pajak pada tahun 2007 sebesar 2,30. Pada Tahun 2008 angka elastisitas Pajak naik menjadi 1,39%, sementara tahun 2009 angka elastisitas naik hampir tiga kali lipat menjadi 3,77% sementara ditahun 2010 elastisitas pajak

turunmenjadi 0,49%. Secara keseluruhan rerata angka elastisitas pajak di kabupaten Manokwari mencapai 1,99.

Dari hasil perhitungan dan pembahasan diatas didapati bahwa elastisitas pajak daerah kabupaten Manokwari terhadap pertumbuhan ekonominya bersifat elastis dalam kriteria pengujian >1 , temuan kemudian menerima hiptesa penelitian yang menyatakan bahwa “diduga bahwa, bentuk Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Manokwari adalah Elastis.

- b. Elastisitas Pajak Daerah Kabupaten Manokwari
- Pengaruh dari fariabel pertumbuhan ekonomi terhadap realisasi Retribusi daerah kabuapten Manokwari dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Elastisitas Retribusi Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2007 sampaidengan 2010					
Tahun	g RD	g PDRB	e RD/PDRB	Kriteria Uji	Sifat
1	2	3	4 (2:3)	5	6
2007	13,96	8,84	1,58	> 1	Elastis
2008	13,26	10,20	1,30	> 1	Elastis
2009	10,44	9,63	1,09	> 1	Elastis
2010	-2,30	9,57	-0,24	< 1	Inelastis
Rerata			0,93	< 1	Inelastis

Sumber: hasil perhitungan, 2012

Berdasarkan tabel di atas dari tahun 2007 s.d. 2009 semua elastisitas berada pada kriteria > 1 yang berarti elastis sementara tahun 2010 elastisitasnya berada pada kriteria < 1 yang berarti sifatnya inelastis, secara rerata elastisitasnya berada pada kriteria < 1 dan sifatnya inelastis.

Angka elastisitas Reatribusi pada tahun 2007 sebesar 1,58 angka ini kemudian turun di Tahun 2008 menjadi 1,30%, sementara tahun 2009 angka elastisitas turun lagi menjadi 1,09% bahkan angka elastisitas tahun 2010 capai angka terendah dari tahun-tahun pengamatan yakni sebesar (-

0,24%) artinya setiap perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% diikuti oleh perubahan Retribusi daerah sebesar (-0,24%). Secara keseluruhan rerata angka elastisitas Retribusi di kabupaten Manokwari mencapai 0,93%.

Dari hasil perhitungan dan pembahasan diatas didapati bahwa elastisitas Retribusi daerah kabupaten Manokwari terhadap pertumbuhan ekonominya bersifat inelastis dalam kriteria pengujian < 1, temuan ini kemudian menolak hiptesa penelitian yang menyatakan bahwa “diduga bahwa, bentuk Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB

Kabupaten Manokwari adalah Elastis”

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Untuk melihat pengaruh perkembangan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah dilakukan dengan pendekatan elastisitas. Sesuai dengan kerangka pemikiran bahwa perkembangan perekonomian akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Semakin baik perekonomian atau semakin meningkat nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor dalam perekonomian maka kemampuan atau potensi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi akan semakin meningkat.

Dari hasil perhitungan sebelumnya angka elastisitas pajak pada tahun 2007 sebesar 2,30 berarti bahwa setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan diikuti perubahan Pajak daerah sebesar 2,30% ini berarti pola hubungan yang terjadi sifatnya positif. Tahun 2008 sebesar 1,39% berarti setiap perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%

selalu diikuti perubahan Pajak daerah sebesar 1,39%, sementara tahun 2009 angka elastisitas sebesar 3,77% berarti setiap perubahan pertumbuhan sebesar 1% diikuti perubahan Pajak daerah sebesar 3,77, angka elastisitas tahun 2010 menunjukkan sebaliknya yakni sebesar 0,49% artinya setiap perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% diikuti oleh perubahan Pajak daerah sebesar 0,49%.

Secara keseluruhan rerata angka elastisitas pajak di kabupaten Manokwari mencapai 1,99% yang berarti perubahan 1% pertumbuhan ekonomi kabupaten Manokwari diikuti oleh perubahan Pajak daerah sebesar 1,99%. Data ini mengindikasikan bahwa perkembangan ekonomi daerah sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan PAD yang dalam kasus penelitian ini diwakili oleh Pajak Daerah.

Selain elastisitas Pajak Daerah Kabupaten Manokwari, angka elastisitas Retribusi pada tahun 2007 sebesar 1,58 berarti bahwa setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan diikuti perubahan

Retribusi daerah sebesar 1,58%. Elastisitas Tahun 2008 sebesar 1,30% berarti setiap perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% selalu diikuti perubahan Retribusi daerah sebesar 1,39%, sementara tahun 2009 angka elastisitas sebesar 1,09% berarti setiap perubahan pertumbuhan sebesar 1% diikuti perubahan Pajak daerah sebesar 1,09%, angka elastisitas tahun 2010 menunjukkan sebaliknya yakni sebesar (-0,24%) artinya setiap perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% diikuti oleh perubahan Retribusi daerah sebesar (-0,24%).

Secara keseluruhan rerata angka elastisitas Retribusi di kabupaten Manokwari mencapai 0,93% yang berarti perubahan 1% pertumbuhan ekonomi kabupaten Manokwari diikuti oleh perubahan Retribusi daerah sebesar 0,93%.

Hasil penelitian ini kemudian memperkuat beberapa penelitian sebelumnya seperti Bachtiar (1992) yang menemukan bahwa Semakin besar PDRB suatu daerah maka akan semakin tinggi PAD dari daerah yang bersangkutan. Jumlah penduduk adalah juga salah satu

faktor yang mempengaruhi besarnya PAD dari suatu daerah.

Manajemen PAD Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kabupaten Manokwari

Dalam rangka pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari, maka pertama yang menjadi perhatian adalah seberapa besar pendapatan yang diterima oleh daerah. Secara obyektif Kabupaten Manokwari dengan kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkisar sekitar 3,39% dari total penerimaan daerah, maka pemerintah daerah harus berusaha menggali dan mengembangkan potensi penerimaan daerah khususnya untuk meningkatkan penerimaan PAD. Dari analisis data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan, ternyata kenaikan penerimaan daerah dari retribusi daerah selama periode analisis rendah dibandingkan dengan rasio kenaikan penerimaan daerah dari pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih merasa rela membayar (*willingness to Pay*) pajak daerah dari pada retribusi daerah

yang manfaat/kontraprestasinya dirasakan langsung oleh pemakai.

Hal yang paling menarik untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan keuangan pada Pemerintah Pusat yang pada akhirnya akan mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah adanya suatu sumber pendanaan lain selain Pajak dan retribusi Daerah. Apabila masih berharap kepada masyarakat tentu tidak akan pernah perolehan Pajak dan retribusi daerah melebihi 3,39% dari total penerimaan daerah. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat dengan tingkat kesadaran membayar yang terendah.

Kabupaten Manokwari hingga kini masih belum memiliki perusahaan untuk mengelola usaha ekonomi oleh karena itu pembentukan BUMD untuk mengelola usaha-usaha ekonomi adalah hal yang paling mendasar. Di sisi lain Kabupaten Manokwari memiliki lahan yang luas dengan kesuburan tanah yang sangat baik sebagaimana kondisi tanah Papua pada umumnya, hal ini harus bisa disiasati dan

dimanfaatkan oleh pemerintah daerah kabupaten Manokwari guna pengembangan tanaman-tanaman perkebunan, hal ini bisa diusahakan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial. Apabila ada suatu wadah yang dibentuk untuk pengelolaan sumber daerah ini dan dimanage oleh orang-orang yang profesional, bukan suatu hal yang mustahil bahwa penerimaan daerah akan sangat meningkat dari usaha yang diurus secara profesional.

Sebagai daerah yang baru berkembang serta merupakan pusat aktivitas pemerintahan di Provinsi Papua Barat maka kabupaten Manokwari adalah daerah yang berpotensi untuk dikembangkan dan menarik bagi pihak swasta untuk berinvestasi. Strategi yang dapat ditempuh dalam rangka menarik investasi ke daerah, *pertama*, dari kebijakan fiskal daerah perlu diberikan tax holiday bagi semua pengusaha yang berprospek baik untuk berinvestasi hal ini bisa dilakukan dengan pebebasan pajak selama beberapa periode pembayaran pajak tentunya dengan kesepakatan yang rasional antara investor dengan

pemerintah daerah. *Kedua* mengenai status tanah, tanah sering menjadi persoalan terbesar bagi semua pendatang di kabupaten Manokwari terutama yang ingin berinvestasi, pemerintah harus bisa menciptakan regulasi khusus pertanahan bersama lembaga adat dan itu merupakan kesepakatan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, hal ini akan membuka kesempatan untuk orang tertarik berinvestasi di kabupaten Manokwari, selanjutnya pemerintah harus memberikan fasilitas kemudahan di bidang permodalan dan perijinan untuk kegiatan industri, *ketiga*, menjamin keamanan bagi pengusaha yang berinvestasi di daerah,

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Secara keseluruhan rerata angka elastisitas pajak di kabupaten Manokwari mencapai 1,99% yang berarti perubahan 1% pertumbuhan ekonomi kabupaten Manokwari diikuti oleh perubahan Pajak daerah sebesar 1,99%. ,Elastisitas pajak daerah kabupaten Manokwari terhadap pertumbuhan ekonomi

bersifat elastis dalam kriteria pengujian >1 , penelitian yang menyatakan bahwa “diduga bahwa, bentuk Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Manokwari adalah Elastis” diterima.

2. Rerata angka elastisitas Retribusi di kabupaten Manokwari mencapai 0,93% yang berarti perubahan 1% pertumbuhan ekonomi kabupaten Manokwari diikuti oleh perubahan Retribusi daerah sebesar 0,93%. bersifat inelastis dalam kriteria pengujian < 1 , ini berarti menolak hipotesa penelitian yang menyatakan bahwa “diduga bahwa, bentuk Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Manokwari adalah Elastis”

Saran

1. Perencanaan pungutan pajak dan retribusi daerah harus didasari pada penentuan potensi yang tepat hingga realisasi juga jelas, dalam hal pungutan pemerintah Kabupaten Manokwari harus bisa melakukan pengwasan

secara teratur hingga tidak terjadi kebocoran.

2. Dengan kondisi ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat sementara dilain sisi kemampuan keuangan daerah sangat rendah maka pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain selain Pajak dan retribusi, seperti pendirian BUMD, membuka kesempatan berinvestasi bagi pihak swasta dengan berbagai kemudahan dan jaminan keamanan, selain itu kalau dimungkinkan, maka pemerintah sebaiknya menjoba pinjaman daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsjad, N. 1992, *Keuangan Negara*, Intermedia, Jakarta
- Bachtiar, Nurzaman, 1992, *Otonomi dan Implikasinya Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Volume IV No.1 dan 2, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- Dasril, M. 2004, *Kebijakan Manajemen Keuangan Daerah*, BPFE, Yogyakarta
- Davey, K.J., 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek International dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, Penerbit UI Press, Jakarta.
- Devas, 1992, *Keuangan Pemerintah Pusat Dan daerah*, UI Press, Jakarta
- Halim Abdul, 2004, *Bungan Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YPKN, Yogyakarta
- Kaho, Josef Riwu. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, M., 1995, *Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan*, "Prisma", No. 4, 3-17.
- Koswara, E. 2000, *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi daerah Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999*, CSIS, Jakarta.
- Kunarjo, 1996, *Perencanaan Dan Pembiayaan Pembangunan*, Edisi Ke Tiga, UI Press, Jakarta
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Mamesah, D, J, 1995, *Sisitim Administrasi Keuangan Daerah*, Cetakan Ke Tiga, Rineka Cipta, Jakarta
- Praetya, G, E, 2005, *Penyusunan Dan*

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penerbit
ANDI, Yogyakarta

Sukirno Sadono, 2005,
Pengantar Ekonomi Teori,
Edisi Ketiga, Rajawali Pers, PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta.